



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



jdih.jatengprov.go.id



birohukumjateng@gmail.com



024-8311282



Jln. Pahlawan No. 9 Semarang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Isu-isu Strategis	8
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	14
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Realisasi Anggaran	77
3.3 Inovasi	78
3.4 Penghargaan	78
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Rekomendasi	85

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2024

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pemetaan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	11
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1.5 : Susunan Kegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.6 : Sarana Dan Prasarana	12
Tabel 1.7 : Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	15
Tabel 1.8 : Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LKjIP Biro Hukum SETDA Tahun 2023	17
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum	19
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2024	20
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Berdasarkan RENSTRA SETDA Tahun 2024-2026	20
Tabel 2.4 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	21
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024	23
Tabel 2.6 : Penganggaran Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024	23
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2024	29
Tabel 3.2 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	31
Tabel 3.3 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.4 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Akhir Tahun 2026	33
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan	35
Tabel 3.6 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.7 : Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang	

	Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	38
Tabel 3.8	: Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	40
Tabel 3.9	: Daftar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024	42
Tabel 3.10	: Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2024	48
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Kabupaten/Kota	63
Tabel 3.12	: Fasilitasi Penanganan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2024	64
Tabel 3.13	: Pelaporan Pemberian Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah	68
Tabel 3.14	: Rekapitulasi Fasilitasi Permasalahan Sengketa Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	73
Tabel 3.15	: Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan	77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	: Screenshot Tampilan Koreksi Ajuan Produk Hukum Daerah	16
Gambar 2.1	: Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS	25
Gambar 2.2	: Aplikasi e-Budgeting	26
Gambar 2.3	: Aplikasi e-Controlling	26
Gambar 2.4	: Aplikasi e-RKO	26
Gambar 2.5	: Aplikasi e-Planning	27
Gambar 2.6	: Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum	27
Gambar 2.7	: Website JDIH Biro Hukum	27
Gambar 2.8	: Aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)	28
Gambar 2.9	: Aplikasi Waskito Jateng	28
Gambar 2.10	: Aplikasi RANHAM Provinsi Jawa Tengah	28
Gambar 3.1	: Penerimaan Penghargaan Terbaik III JDIH Awards Tahun 2024	80
Gambar 3.2	: Penerimaan Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang telah berhasil membina Pemerintah Kabupaten/ Kota Peduli HAM karena telah berhasil mendorong 34 Kabupaten/Kota Peduli HAM	81
Gambar 3.3	: Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang telah berhasil membina Pemerintah Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2023	82
Gambar 3.4	: Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024	83
Gambar 3.5	: Piagam Penghargaan Dan Piala Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024	83

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Semarang, 13 Februari 2025

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH



IWANUDDIN ISKANDAR, SH. MHum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Disamping itu juga masyarakat menuntut adanya supremasi hukum, terjaminnya kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil dan merata, penegakan keadilan yang obyektif dan manusiawi, produk hukum daerah yang melindungi kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan hukum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk lembaga Biro Hukum di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dapat teratasi.

Disamping itu pula diharapkan keberadaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung program visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Diantaranya adanya permasalahan yang perlu ditangani dengan belum optimalnya rekomendasi penyusunan kebijakan daerah dan belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten/Kota.

1.2 Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan di hukum pada umumnya timbul dari beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal, diantaranya pendayagunaan kemampuan SDM yang belum optimal, koordinasi yang masih kurang, kepatuhan aparaturnya dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, perkembangan keadaan dan situasi jaman yang selalu mengalami dinamika dan perubahan yang berdampak pada produk-produk hukum yang sedang berlaku, serta hal-hal lain yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana permasalahan di bidang hukum dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lain yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah terutama di bidang hukum telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan bidang hukum yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan utama (*strategic issued*) dalam pembangunan di bidang hukum yang sedang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Pemetaan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan.	Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif.
2.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga	Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif.

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
	permasalahan dalam pelaksanaannya.	menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	
3.	Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah.	Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada tahun 2024, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Berdasarkan jabatan :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	-	-	11	1	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	-	1	10	4	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	11	1	12
Jumlah Total	1	-	1	32	6	40

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	PPPK Gol. IX	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	1	9	1	1	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2	13	-	-	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	3	9	-	-	12
Jumlah Total	7	31	1	1	40

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana S1/ D4	Sarjana Muda/D3	SLTA	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	2	10	-	-	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	6	8	1	-	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	2	10	-	-	12
Jumlah Total	11	28	1	-	40

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.5.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Perundang-undangan	7	5	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	10	5	15
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	5	7	12
Jumlah Total	23	17	40

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari :

Tabel. 1.6.
Sarana dan Prasana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	43 Unit	Baik
4.	Laptop	7 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	<i>Pesawat Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	2 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2024, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, dan Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp.3.648.837.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan memuat latar belakang dibentuknya organisasi, mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dukungan SDM, sarana prasarana dan Anggaran. Selanjutnya disampaikan sistematika penulisan, tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 serta langkah perbaikan internal OPD.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD yang memuat rencana strategis yang terdiri dari visi, misi dan tujuan & sasaran. Selanjutnya diuraikan terkait strategi dan arah kebijakan yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra. Menyampaikan struktur program dan kegiatan tahun 2024, Perjanjia Kinerja tahun 2024, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja dengan menyajikan instrumen-instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS, aplikasi yang dikembangkan oleh OPD, serta aplikasi dari kementerian yang digunakan jika ada.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya (2022 dan 2023). Selanjutnya membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional jika ada.

2. Menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Menyampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disampaikan efisiensi anggaran apabila ada sisa anggaran. Menyampaikan efektifitas bila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih dan anggaran hanya terserap 96% ke bawah.
4. Menyampaikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
5. Menyajikan inovasi-inovasi yang dilakukan dan dimiliki oleh OPD dalam mendukung kinerja di tahun 2024.
6. Menyajikan penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik regional maupun nasional di tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi yang menampilkan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pada Tahun 2023 terdapat rekomendasi terhadap evaluasi SAKIP yang diberikan kepada Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya termasuk Biro Hukum dan telah ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7.
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyelaraskan output dan target kinerja triwulan capaian kinerja pada dokumen indikator kinerja individu dengan e-controlling kinerja	Menyelaraskan output dan target kinerja triwulanan capaian kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu dengan e-controlling kinerja.
2.	Memberikan detail dan progres kegiatan penyelesaian masalah dalam rekomendasi LKjIP sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.	a. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholder lainnya dalam memastikan kebijakan terlaksana dengan optimal diantara terkait koordinasi Peningkatan Layanan EPHD (Screenshoot tampilan koreksi ajuan produk hukum daerah). b. Melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan bersinergi dengan agenda kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantara melalui fasilitasi, evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota. Contoh : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. c. Meningkatkan pelaksanaan agenda untuk mendukung target kinerja program kegiatan yang mendukung kinerja tujuan sasaran SETDA yaitu melalui Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum dengan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Tindak lanjut terhadap rekomendasi/saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8.
Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LKjIP
Biro Hukum SETDA Tahun 2023

No.	Rekomendasi/Saran	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perlunya peningkatan kualitas SDM pada Biro Hukum khususnya terhadap Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, sehingga diperlukan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang dapat mendukung kinerja, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum	Telah ditugas 2 orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Telah dilaksanakan
2.	Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya di Jawa Tengah yang sedang menghadapi permasalahan hukum belum merata	Mendorong agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya lebih merata	Tindak lanjut masih berlangsung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Dalam melaksanakan program pembangunan di Jawa Tengah Biro Hukum Sekretariat Daerah mendukung visi Gubernur Jawa Tengah yaitu **"JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI"**.

2. Misi

Biro Hukum melaksanakan Misi Ke-6 dari misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

3. Tujuan & Sasaran

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : **"Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah"** dan **"Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah"** dengan sasaran dan indikator strategis sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah dengan indikator strategis :
 - a. Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.
 - b. Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.
 - c. Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.

- d. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.
- 2) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum dengan indikator strategis persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 untuk Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96	97	97
			Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	96	96
			Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	96	96
			Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	96	96
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	100	100
			Nilai IKM Biro Hukum	82	82,5	83
		Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	2,83	2,85	2,87

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Biro Hukum melaksanakan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	96
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	Persen	96
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	96
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	96
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persen	100
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	82
3.	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	Angka	28,3

Tabel 2.3.
Sasaran, Startegis dan Arah Kebijakan
Berdasarkan RENSTRA SETDA Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kebijakan daerah yang berorientasi hasil dan adaptif
			Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	Peningkatan Efektivitas Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui Sinkronisasi Agenda Biro-Biro Lingkup Sekretariat Daerah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 program diantaranya sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dari 2 program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan. 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan. 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya. 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum.

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	96
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	Persen	96
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	96
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	96
2.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	82

Tabel 2.6.
Penganggaran Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96 %	2.772.628.000
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96 %	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96%	
		Persentase kabupaten/ kota peduli HAM	96%	
	a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 dokumen	470.250.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	44.000.000
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	486.756.000
		Jumlah Dokumen Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	671.546.000
	b. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara.	12 dokumen	745.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	355.076.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100 %	876.209.000
		Nilai IKM Biro Hukum	82	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	100 %	700.000.000
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100 %	176.209.000

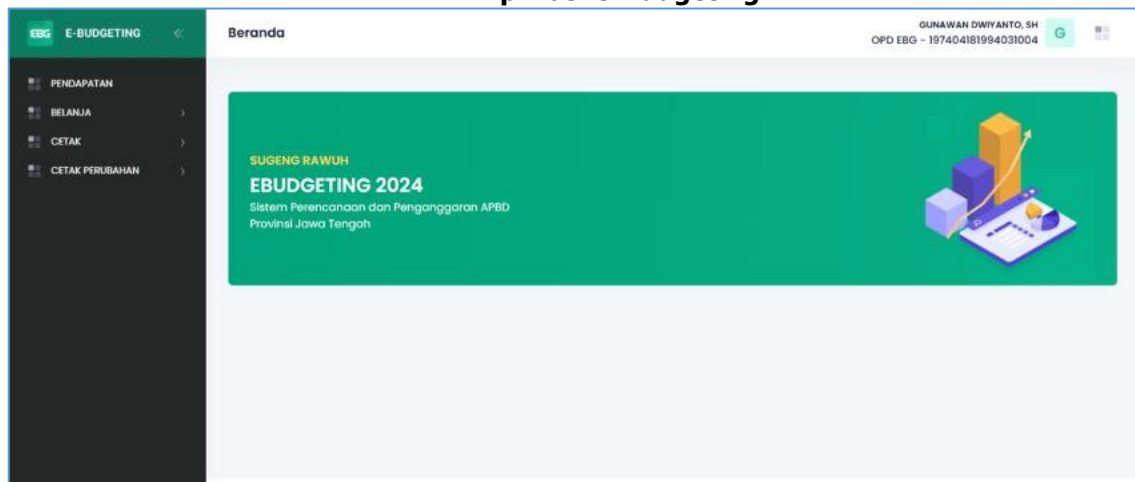
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Hukum dalam melaksanakan capaian kinerja dan penerapan SAKIP di dukung dengan instrumen-instrumen, antara lain :

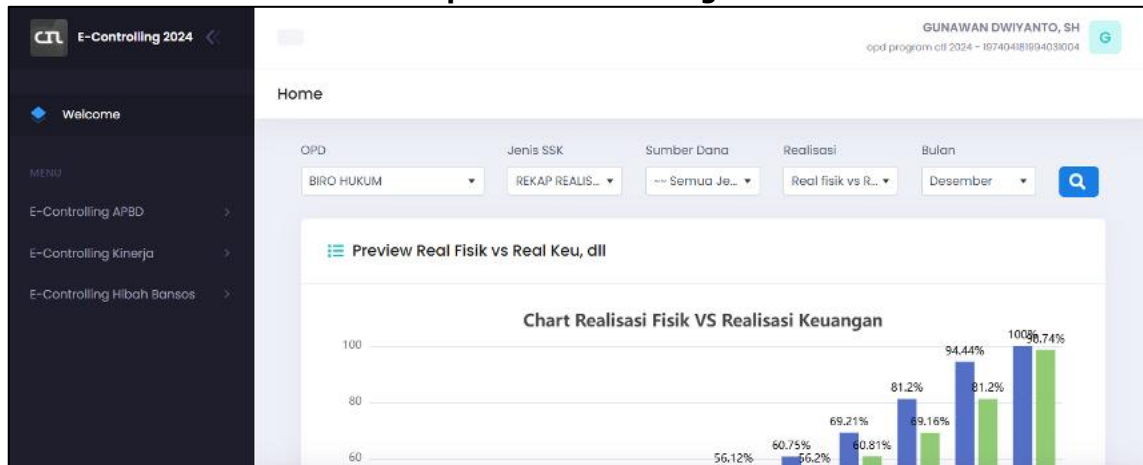
Gambar 2.1.
Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS



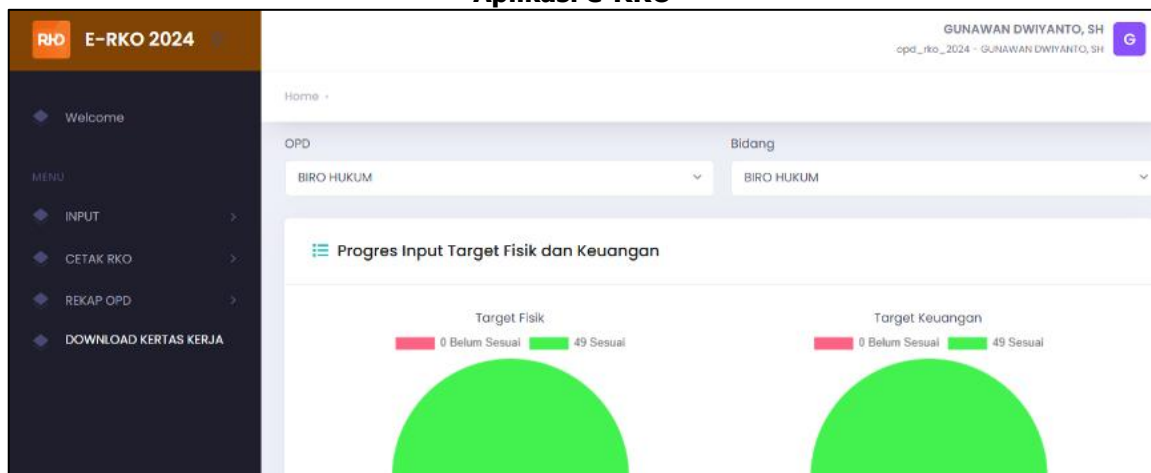
Gambar 2.2.
Aplikasi e-Budgeting



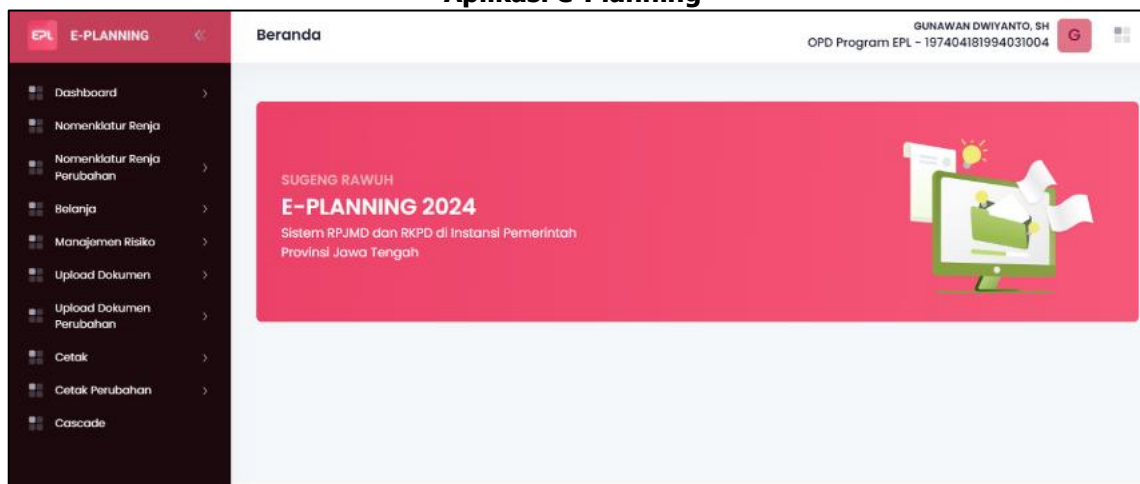
Gambar 2.3.
Aplikasi e-Controlling



Gambar 2.4.
Aplikasi e-RKO



Gambar 2.5.
Aplikasi e-Planning



Gambar 2.6.
Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum



Gambar 2.7.
Website JDIH Biro Hukum



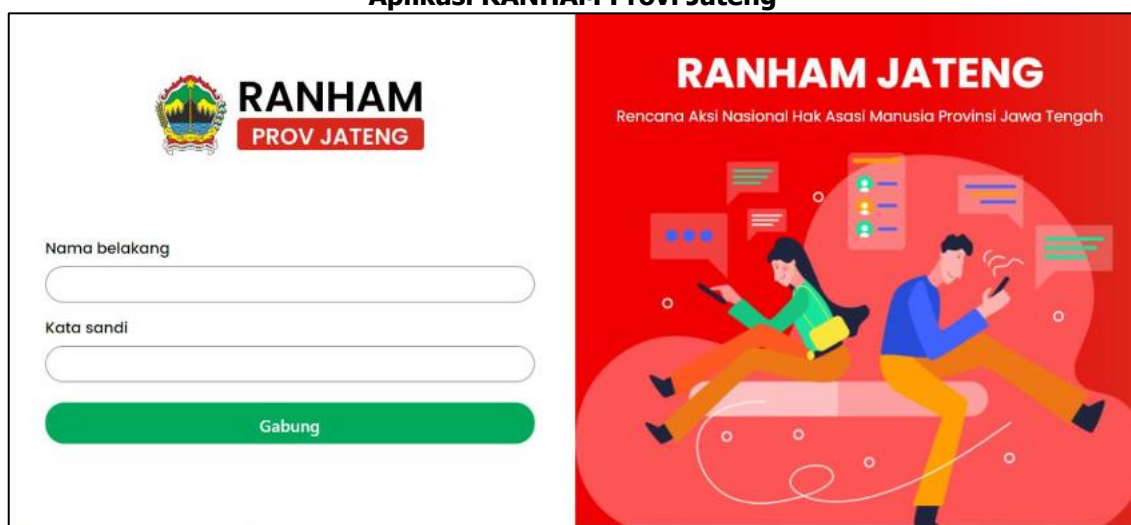
Gambar 2.8.
Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)



Gambar 2.9.
Aplikasi Waskito Jateng



Gambar 2.10
Aplikasi RANHAM Prov. Jateng



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- b. Tinggi : 76 – 90,99%
- c. Sedang : 66 – 75,99%
- d. Rendah : 51 - 65,99%
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Rencana Kerja Tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan “Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Daerah”. Selanjutnya dalam menjabarkan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Biro Hukum melaksanakannya melalui sasaran strategis Biro Hukum tahun 2024 yang capaiannya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
1	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	96	100	104	97

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	Persen	96	100	104	96
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	Persen	96	100	104	96
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	Persen	96	100	104	96
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persen	100	100	100	100
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	82	86	105	83

Biro Hukum melalui **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dan **Program Administrasi Umum** dengan alokasi anggaran Rp.3.648.837.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.602.928.240,- (98,74%). Program ini terdistribusi kedalam 2 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian "**Sangat Tinggi**" yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dengan realisasi 104% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 96%, persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji dengan realisasi 104% melebihi target, persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 104% melebihi target, persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 104% melebihi target dari target yang ditetapkan sebesar 96%, dan Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian yang rata-rata sesuai target karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan

harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub). Analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum telah dilakukan sesuai dengan target capaian. Demikian pula pendokumentasian produk-produk hukum baik secara manual maupun digitalisasi yang diupload ke dalam website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Disamping itu pula penggunaan aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, Waskito Jateng semakin mempermudah dalam pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Terhadap hasil kinerja tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96%	100%	104%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	96%	100%	104%	Sangat Tinggi	Biro Hukum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%	100%	104%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	96%	100%	104%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
2.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
		Nilai IKM Biro Hukum	82	86	105	Sangat Tinggi	Biro Organisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Hukum capaian realisasinya dikategorikan **“Sangat Tinggi”**. Hal tersebut dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	95 %	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %	104 %

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	95 %	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %	104 %
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	95 %	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %	104 %
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	95 %	100 %	105 %	96%	100 %	104 %	96 %	100 %	104 %
2.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai IKM Biro Hukum	78	87,5	112	78,5	83,5	106	82	86	105

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya rata-rata selalu melebihi target.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Akhir Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas	Persentase rancangan produk hukum	100%	97%	103%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	produk hukum daerah.	daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.			
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	100%	96%	104%
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%	96%	104%
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100%	96%	104%
2.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%
		Nilai IKM Biro Hukum	86	83	96,5%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Hukum Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata telah melampaui target. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator kinerja telah tercapai 100%.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sedangkan analisis terhadap penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96%	100%	104%	Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu.	-
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	96%	100%	104%	Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu.	-
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%	100%	104%	Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk.	-
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	96%	100%	104%	Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
2.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.	-
		Nilai IKM Biro Hukum	82	86	105	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Biro Hukum.	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Hukum Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu, Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu, Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk, Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota, Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Biro Hukum.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96%	100 %	104 %	1.001.006.000	995.916.900	99,49	0,51
2.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	96%	100 %	104 %	671.546.000	669.645.055	99,72	0,28
3.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%	100 %	104 %	745.000.000	741.776.470	99,57	0.43
4.	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	96%	100 %	104 %	355.076.000	344.105.065	96,91	3,09
5.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	876.209.000	851.484.750	97,18	2,82
	Nilai IKM Biro Huku	82	86	105 %				

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari anggaran Biro Hukum sebesar Rp.3.648.837.000,- atas pencapaian 5 (lima) indikator program pada

tahun 2024 sebesar Rp.3.602.928.240,- (98,74%) capaian realisasi anggaran dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,26%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disampaikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	Menunjang
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	Menunjang
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 dokumen	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	Menunjang
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100%	Menunjang
			82		Nilai IKM Biro Hukum	86	Menunjang
			100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 4 (empat) indikator kinerja program, dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan penunjang Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada indikator kinerja persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada tahun 2024 telah berhasil menyusun 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang didukung pula melalui Sub

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan 12 dokumen pengkajian melalui Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

Pada Tahun 2024 juga telah ditetapkan 13 (tiga belas) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.8.
Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PERDA	Penetapan Dan Pengundangan	Lembaran Daerah (LD) dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18 Januari 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2024 Nomor 1 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (1-26/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	23 Agustus 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 2 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-157/2024)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	28 Agustus 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (6-159/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	28 Agustus 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (7-160/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157

PERDA	Penetapan Dan Pengundangan	Lembaran Daerah (LD) dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	28 Agustus 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (8-161/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 158
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	17 September 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (9-221/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	26 September 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10-222/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 160
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	17 Oktober 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (13-278/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	18 Oktober 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (12-266/2024)
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	18 Oktober 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (11-223/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 162
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11 Desember 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (14-309/2024)

PERDA	Penetapan Dan Pengundangan	Lembaran Daerah (LD) dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD)
		Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 163
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30 Desember 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (15-339/2024)
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	31 Desember 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13

Tahun 2024 Biro Hukum telah melaksanakan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan dan menghasilkan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, yaitu :

Tabel 3.9
Daftar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
1.	1 TAHUN 2024	Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024	12 Januari 2024	12 Januari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 1	Biro Isda
2.	2 TAHUN 2024	Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25 Januari 2024	25 Januari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 2	BPKAD

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
3	3 TAHUN 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	29 Januari 2024	29 Januari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 3	RS Dr. Moewardi
4	4 TAHUN 2024	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	31 Januari 2024	31 Januari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 4	Dinas Sosial
5	5 TAHUN 2024	Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13 Februari 2024	13 Februari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 5	Bapenda
6	6 TAHUN 2024	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039	13 Februari 2024	13 Februari 2024	BD Tahun 2024 Nomor 6	Disperakim
7	7 TAHUN 2024	Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan/Atau Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Provinsi	13 Maret 2024	13 Maret 2024	BD Tahun 2024 Nomor 7	BPBD
8	8 TAHUN 2024	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024	25 Maret 2024	25 Maret 2024	BD Tahun 2024 Nomor 8	BPKAD
9	9 TAHUN 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan	02 Mei 2024	02 Mei 2024	BD Tahun 2024 Nomor 9	BPKAD

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024				
10	10 TAHUN 2024	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan Dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima	13 Mei 2024	13 Mei 2024	BD Tahun 2024 Nomor 10	Bapenda
11	11 TAHUN 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13 Mei 2024	13 Mei 2024	BD Tahun 2024 Nomor 11	Bapenda
12	12 TAHUN 2024	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	30 Mei 2024	30 Mei 2024	BD Tahun 2024 Nomor 12	Dinas Pendidikan
13	13 TAHUN 2024	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera	21 Juni 2024	21 Juni 2024	BD Tahun 2024 Nomor 13	Dinsos
14	14 TAHUN 2024	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026	21 Juni 2024	21 Juni 2024	BD Tahun 2024 Nomor 14	Biro Pemotda
15	15 TAHUN 2024	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	21 Juni 2024	21 Juni 2024	BD Tahun 2024 Nomor 15	Kesbang pol
16	16 TAHUN 2024	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026	17 Juli 2024	17 Juli 2024	BD Tahun 2024	Bappeda

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
					Nomor 16	
17	17 Tahun 2024	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	30 Juli 2024	30 Juli 2024	BD Tahun 2024 Nomor 17	Dinkop UMKM
18	18 Tahun 2024	Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah	30 Juli 2024	30 Juli 2024	BD Tahun 2024 Nomor 18	Biro Organisa si
19	19 Tahun 2024	Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah <i>Corporate University</i>	7 Agustus 2024	7 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 19	BPSDMD
20	20 Tahun 2024	Rencana Induk Pergaraman Daerah	13 Agustus 2024	13 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 20	DKP
21	21 Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	14 Agustus 2024	14 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 21	Bappeda
22	22 Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang RKPD 2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 22	Bappeda
23	23 Tahun 2024	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023	26 Agustus 2024	26 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 23	BPKAD
24	24 Tahun 2024	Klasifikasi Arsip	26 Agustus 2024	26 Agustus 2024	BD Tahun 2024	Dinas Arpus

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
					Nomor 24	
25	25 Tahun 2024	Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	29 Agustus 2024	29 Agustus 2024	BD Tahun 2024 Nomor 25	DP3AP2 KB
26	26 Tahun 2024	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah	6 September 2024	6 September 2024	BD Tahun 2024 Nomor 26	Disporapar
27	27 Tahun 2024	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029	14 Oktober 2024	14 Oktober 2024	BD Tahun 2024 Nomor 27	Dinkes
28	28 Tahun 2024	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	BD Tahun 2024 Nomor 28	BPKAD
29	1 Tahun 2024	Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD	13 November 2024	13 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 29	Setwan
30	29 Tahun 2024	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Prov. Jawa Tengah	13 November 2024	13 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 30	
31	30 Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2024	13 November 2024	13 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 31	BPKAD
32	31 Tahun 2024	Pengelolaan Piutang Daerah	25 November 2024	25 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 32	

No	Nomor Pergub	Tentang	Tanggal		Tahun Dan Nomor Berita Daerah	SKPD Pengampu
			Ditetapkan	Diundangkan		
33	32 Tahun 2024	Tata cara bagi hasil penerimaan pajak daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	25 November 2024	25 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 33	Bapenda
34	33 Tahun 2024	Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk pembuatan tahun 2023 dan sebelum tahun 2023	25 November 2024	25 November 2024	BD Tahun 2024 Nomor 34	Bapenda
35	34 Tahun 2024	Tarif retribusi daerah atas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah	2 Desember 2024	2 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 35	Bapenda
36	35 Tahun 2024	Penyusunan tarif retribusi daerah	2 Desember 2024	2 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 36	Bapenda
37	36 Tahun 2024	Rencana aksi daerah tujuan pengembangan Berkelanjutan Tahun 2024-2026	4 Desember 2024	4 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 37	Bappeda
38	37 Tahun 2024	Perubahan Kedua Pergub 28 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024	13 Desember 2024	13 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 38	BPKAD
39	38 Tahun 2024	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30 Desember 2024	30 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 39	BPKAD
40	39 Tahun 2024	Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2024	BD Tahun 2024 Nomor 40	BPKAD

Selain itu Biro Hukum pada tahun 2024 juga telah melakukan analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan keadaan, dengan data hasil anev dan pengkajian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10.
Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2024

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
1.	a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan, Otonomi daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan menyusun konsep Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan/saran perbaikan regulasi di sektor Kerja Sama Daerah khususnya : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan regulasi sektoral lainnya terkait: a. adanya perbedaan jenis dokumen naskah kerjasama yang berbeda dalam hal melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga melalui Nota Kesepakatan dan Kesepakatan Bersama dan PKS yang pada dasarnya baik tugas tanggung jawab atau hak dan kewajiban masing-masing	Menindaklanjuti dengan membuat surat ke kemendagri atas rekomendasi dari Biro hukum tapi belum ada tanggapan 1a, BLUD apakah dimasukkan kedalam aturan Kerjasama daerah karena memiliki kekhusuan tersendiri yang sudah diatur.

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			pihak saling terkait satu sama lain; b. Tidak adanya pengaturan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama dalam hal Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah bersama-sama terlibat menjadi subyek kerjasama pada suatu obyek kerjasama, baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan regulasi turunannya termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 termasuk pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama; c. tidak ada pengaturan khusus terkait bagaimana tahapan dan dokumen naskah kerjasama pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD, baik dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			Nomor 79 Tahun 2018 sehingga menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasama BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 melalui penyusunan Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur dokumen kerjasama di Lingkungan BLUD; dan d. tidak diatur secara jelas kedudukan BUMD dalam hal terlibat bersama sebagai subyek kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki BUMD tersebut dalam regulasi yang mengatur kerjasama daerah baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, sehingga menjadi kendala dan menimbulkan ambiguitas atau	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			multitafsir apakah Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah itu sendiri 2. Mengoordinasikan terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama BLUD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bersama unsur instansi terkait sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar melakukan: - penyesuaian khususnya penguatan pengaturan pengembangan, pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. - Menyusun daftar inventarisasi kebutuhan pengaturan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; - Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Sudah ditetapkan tinggal proses pengundangan dan sosialisasi. Sudah menyusun draft Pergub Juklak Juknis tinggal pengajuan ke Biro Hukum

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			d. Menyiapkan konsep pengaturan yang bersifat teknis dan implementatif dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan e. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan mengoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	a. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru tentang penyelenggaraan Kesehatan dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang substansinya antara lain memuat: 1) Sistem Penyelenggaraan Kesehatan yang mengacu pada sub sistem kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 2) Penguatan sistem Kedaruratan Kesehatan; 3) Jaminan Kesehatan; 4) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa	Sudah menindaklanjuti dengan koordinasi ke bidang-bidang untuk penyusunan Raperda yang baru. dan persiapan penyediaan anggaran di tahun 2026.

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi; dan 5) muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Tengah. b. Terkait penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, perlu segera disusun mengingat secara normatif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 masih berlaku sepanjang ketentuan yang diatur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun demikian dalam hal kebijakan Sistem Kesehatan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka penyusunan Peraturan Gubernur dapat disusun sekaligus yang substansinya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah terbaru. c. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			mengoordinasikanny dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.	
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan: 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	a. Dengan adanya disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan perubahan kewenangan serta ketidakefektifan pelaksanaan dan tumpang tindih pengaturan, perlu dilakukan pencabutan terhadap: 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa		31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah, b. Dalam rangka perbaikan dan sinkronisasi materi muatan dalam regulasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap: 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah; 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah; c. Selanjutnya dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan kebijakan di sektor perhubungan, maka terhadap: 1) Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan selain Rencana Induk Pelabuhan Batang,	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
	Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa; 7. Oeraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana; 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara; 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang; 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan 12. Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah; dan 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor:		perlu dilakukan kajian secara teknis /evaluasi secara teknis di lapangan dan dalam hal dibutuhkan penyesuaian terhadap dokumen rencana induk dan selanjutnya agar terjadi konsistensi terhadap kebijakan penetapan dokumen perencanaan pelabuhan regional dapat dilakukan dengan penetapan melalui bentuk Keputusan (beschiking) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian secara teknis/evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, bahwa secara eksisting terdapat 2 (dua) trayek yang tidak operasional sehingga membuat Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini. Dalam hal kajian teknis/evaluasi	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
	551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.		terdapat perubahan, maka penetapan trayek perlu disesuaikan dengan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah. d. Dalam melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c agar mepedomani hasil analisis dan evaluasi (sebagaimana terlampir) dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.	
5.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dengan Perangkat Daerah terkait (Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Dalam rangka konsistensi dan penyederhanaan kebijakan pengelolaan katalog elektronik lokal di lingkungan Pemerintah Jawa Tengah, perlu adanya perbaikan Keputusan Gubernur terkait dengan pemberian kewenangan pengelolaan katalog elektronik lokal termasuk konsolidasi katalog elektronik dengan menyusun 1 (satu) Keputusan Gubernur kepada Lembaga penerima kewenangan yang tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dapat berjalan efektif dan efisien yaitu Biro	Sudah mengadakan rapat dan disepakati ada revisi Keputusan Gubernur memberikan mandat kewenangan kepada Kepala Biro APBJ di bulan 27 September 2024,

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	
6.	a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal; dan d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	a. Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur terkait yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. United Power Di Kawasan Industri Kendal serta mengoordinasikan tarif tenaga listrik di Kawasan Industri Kendal dengan Pemerintah Pusat; b. Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa substansi terkait dengan penyelenggaraan perizinan sektor tenaga listrik, pengaturan tarif tenaga listrik dan kebijakan rencana umum ketenagalistrikan serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik oleh BUMD. c. Melakukan penyesuaian kebijakan Rencana Umum Ketenagalistrikan	Akan dihold terkait pencabutan tarif yang sudah berlaku akan tetap berlaku sampai ada perubahan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2022 di aturan peralihan. Untuk RUKD, menunggu RUKN ditetapkan sehingga belum bisa proses Untuk Perda ketenagalistrikan sudah dinventarisasi, terhadap substansi yang ada perubahan dan usulan Pimpinan menjadi Perda inisiatif DPRD.

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
	Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037.		Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037 melalui penetapan Keputusan Gubernur dengan mendasarkan hasil evaluasi tahunan RUKD dan pemutakhiran RUKD 5 (lima) tahunan dengan adanya perkembangan kebijakan RUKN Nasional maupun perkembangan keadaan yang ada serta melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan kebijakan RUKD Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	a. Mengusulkan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi; b. Melakukan pendataan potensi panas bumi yang ada di Jawa Tengah sebagai data dalam penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi sebagaimana	Sudah mengajukan pencabutan

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			dimaksud pada huruf b diupayakan dilakukan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dengan mengintegrasikan pengaturannya dalam kebijakan yang mengatur energi yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	a. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah: 1) Melakukan penyesuaian Peraturan Daerah ini dengan mendasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi; 2) Melakukan optimalisasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi dan mensinergikan dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya energi baru terbarukan, Kerangka Desa Mandiri Energi serta	Sudah diskusi dengan dewan energi nasional berdasarkan perpres 73 tahun 2023 tentang tatacara penyusunan RUEN dan RUED disebutkan bahwa RUED mengatur energi tingkat provinsi, sebaiknya dijadikan satu, sehingga menunggu penetapan, pembahasan secara internal belum ada, yang sudah dibahas masih RUED, tahun 2025 kajian.

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
			Penerapan Sanksi Pidana; 3) Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. b. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan review atau peninjauan setiap 5 tahun terhadap dokumen RUED sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 untuk mengukur dan melihat pelaksanaan pengelolaan energi apakah telah sejalan dengan dokumen RUED dan kebijakan nasional dibidang Perencanaan Energi.	

No.	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Rekomendasi Hasil Kajian	Keterangan
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dengan menyusun Peraturan Daerah baru dan peraturan pelaksanaannya yang didasarkan pada: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 3) Kondisi dan kebutuhan pengaturan muatan lokal tambahan guna menunjang pembangunan bidang keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah. b. Menyusun Desain Olahraga Daerah dengan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. c. Melakukan pemetaan dan inventarisasi permasalahan di bidang keolahragaan guna menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan dan prestasi keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.	• Sudah menindaklanjuti dengan menyusun Perda yang merupakan inisiatif Dewan dan Pergub DOD yang merupakan usulan Dinpora, (sudah proses 80 %). • Kendalanya ada penyesuaian dengan terbitnya UU tahun 2022 sedang PP nya terbit di tahun 2024. • Perda sudah masuk Propem 2024 terkait Perda Keolahragaan sudah dalam pembahasan Komisi E DPRD sudah final dan akan difasilitasi di Bulan Jan 2025 (Sek DPRD Prov)

Sedangkan Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan untuk menunjang indikator kinerja program persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi, telah berhasil menyusun 12 dokumen fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang Undangan didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang diwujudkan dalam bentuk pengkajian, evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

No.	Sub Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	120 dokumen	210 dokumen	175 %
2.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	127 dokumen	243 dokumen	191 %
3.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah III.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	120 dokumen	200 dokumen	167 %

b. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang indikator kinerja program persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.

Fasilitasi penanganan perkara di lembaga peradilan, fasilitasi penanganan perkara di Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan :

1. Agar permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan.
2. Supaya terwujud sinkronisasi dalam penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
3. Supaya terpenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Pada indikator program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum :

- a) Pelaksanaan fasilitasi penanganan perkara dari target sebanyak 11 perkara dan telah difasilitasi penanganannya sejumlah 17 perkara.

Tabel 3.12.
Fasilitasi Penangan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2024

1) Perdata

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
1.	113/Pdt.G/2023/PN.Kln	Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum pembayaran dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Solo-Jogja	Putusan (Inkract)
2.	235/Pdt.G/2023/PN.Smn	Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener	Kasasi
3.	608/Pdt.G/2023/PN.Smg	Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum pembayaran <i>success fee</i> dan <i>profesional fee</i> dalam pembebasan lahan	Putusan (Inkract)

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
		untuk pembangunan jalan Tol Semarang-Demak	
4.	83/Pdt.G/2024/PN.Smg	Terkait dengan perbuatan Melawan Hukum dalam pembayaran dana kerohiman tanah musnah dalam pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Semarang-Demak	Kesimpulan
5.	15/Pdt.G/2024/PN Pbg	Terkait dengan Perbuatan melawan hukum Pegawai SMK Karanganyar Purbalingga dan SMA Bobot Sari Purbalingga	Putusan (Inkract)
6.	7/Pdt.G/2024/PN.Rbg	Terkait dengan Perbuatan melawan hukum Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang	Penetapan / putusan
7.	27/Pdt.G/2024/PN.DMK	Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Penggantian tanah khas Desa Desa Kendal Doyong Tol Smg-Demak	Kesimpulan
8.	36/Pdt.G/2024/PN.Byl	Terkait Perbuatan melawan Hukum adanya Fraud di UPPD Samsat Kota Surakarta	Banding
9.	26/Pdt.G/2024/PN.Rbg	Terkait Perbuatan melawan Hukum adanya penambangan di atas tanah warga Rembang	Pembuktian

2) Tata Usaha Negara (TUN)

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
1.	76/G/2023/PTUN.SMG	Terkait dengan pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kota Salatiga	Putusan (Inkract)
2.	10/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur terkait Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Putusan (Inkract)
3.	86/G/TF/2022/PTUN.SMG	Terkait dengan pencoretan tanah eks SHP 12 di Desa Mangkang Kulon	Eksekusi

3) Sengketa Informasi

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
1.	066/SI/IX/2023	Terkait dengan Sengketa Informasi Permohonan Publik Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait hardcopy informasi dokumen kontrak dan lampirannya	Putusan
2.	097/SI/XI/2023	perkara sengketa informasi publik Register Nomor Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang mengenai pembahasan Raperda RTRW yang sedang berlangsung.	Putusan
3.	067/SI/IX/2023	Terkait dengan Sengketa Informasi Permohonan Publik Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait hardcopy informasi dokumen kontrak dan lampirannya	Putusan
4.	068/SI/IX/2023	Terkait dengan Sengketa Informasi Permohonan Publik Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait hardcopy informasi dokumen kontrak dan lampirannya	Putusan
5.	015/SI/V/2023	Terkait dengan Sengketa Informasi Permohonan Publik Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait informasi dokumen kontrak dan lampirannya di PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Putusan

- b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh pemerataan keadilan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-

langkah melalui fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang sedang berperkara di lembaga peradilan yang bekerjasama dengan 23 (dua puluh tiga) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Pimpinan Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah;
2. Pimpinan Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah;
3. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil;
4. Pimpinan Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus;
5. Pimpinan Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum Kabupaten Kudus;
6. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng;
7. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu;
8. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Kamilia;
9. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma Demak;
10. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners;
11. Pimpinan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara;
12. Pimpinan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara;
13. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Temanggung;
14. Pimpinan Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
15. Pimpinan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto;
16. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo;
17. Pimpinan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo;

18. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara;
19. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap;
20. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia Purwodadi;
21. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo.
22. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal;
23. Pimpinan Perkumpulan Law & Justice Semarang.

Pada Tahun 2024 melalui LBH telah menangani 200 perkara sebagaimana data berikut :

Tabel 3.13.
Pelaporan Pemberian Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
1	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ).	I		✓	Konsultasi Hukum	Permasalahan Hukum perdata	Lengkap
		II	✓		5/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Tipu Muslihat	Putusan
		II	✓		10/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Tipu Muslihat	Putusan
		II	✓		4/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Kekerasan Persetubuhan	Putusan
		III	✓		2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wsb.	Pidana Pencurian	Putusan
		III	✓		25/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		41/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		33/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Asusila	Putusan
		IV	✓		63/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Mempunyai Bahan Peledak	Putusan
		IV	✓		53/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.	Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi	Putusan
2	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.	I	✓		3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mkd	Pidana Anak	Putusan
		II	✓		4/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mgg.	Pidana Membawa Senjata Penusuk	Putusan
		II	✓		3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mgg.	Pidana Membawa Senjata Tajam	Putusan
		II	✓		24/Pid.B/2024/PN.Mkd.	Pidana Pengedaran Uang Palsu	Putusan
		III	✓		108/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.	Pidana Senjata Ilegal	Putusan
		III	✓		59/Pdt.G/2024/PA.Mgl	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		58/Pdt.G/2024/PA.Mgl	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		13/Pid.Sus.anak/2024/PN.Mgg	Pidana tanpa hak membawa senjata tajam	Putusan
3	Lembaga Bantuan Hukum Temanggung.	I	✓		40/Pdt.G/2024/PA.Tmg	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Penyuluhan Hukum	Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Hukum di Rutan Temanggung	Lengkap
		II	✓		222/Pdt.G/2024/PA.Tmg	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		244/Pdt.G/2024/PA.Tmg	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		647/Pdt.G/2024/PA.Tmg	Perdata Perceraian	Putusan
4	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara.	I		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Penganiayaan	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Pencurian	Lengkap

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Bahan peledak	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Bahan peledak	Lengkap
		II	✓		281/Pdt.G/2024/PA.Ba	Perdata Perceraian	Putusan
				✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Penganiayaan	Lengkap
		III	✓		51/Pid.Sus/2024/PN.Bnr	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		42/Pid.Sus/2024/PN.Bnr	Pidana Narkotika	Putusan
		III		✓	Penyuluhan Hukum	Hak warga binaan dalam mengakses keadilan	Lengkap
		IV	✓		63/Pid.B/2024/PN.Bnr	Pidana Kekerasan Anak sampai meninggal	Putusan
		IV	✓		44/Pid.Sus/2024/PN.Bnr	Pidana Narkotika	Putusan
5	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Perisai Kebenaran Purwokerto.	-	-	-	-	-	-
6	Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap.	I	✓		3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp	Pidana Anak	Putusan
		II	✓		11/Pid.Sus/2024/PN.Clp.	Pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk	Putusan
		II	✓		38/Pid.Sus/2024/PN.Clp.	Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu	Putusan
		II		✓	Konsultasi Hukum	Konsultasi hukum terkait dengan penelantaran kepada keluarga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Lengkap
		III	✓		70/Pid.Sus/2024/PN.Clp	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		132/Pid.B/2024/PN.Clp	Pidana Judi	Putusan
		III	✓		148/Pid.Sus/2024/PN.Clp	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		197/Pid.Sus/2024/PN.Clp	Pidana Senjata Tajam	Putusan
		IV	✓		221/Pid.Sus/2024/PN.Clp	Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi	Putusan
7	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pendowo Solotigo.	I		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkoba	Putusan
		I		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkoba	Putusan
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkoba	Putusan
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkoba	Putusan
		II	✓		18/Pid.Sus/2024/PN. Slt	Pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah	Putusan
		III		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkotika	Lengkap
		III		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkotika	Lengkap
		III	✓		31/Pid.Sus/2024/PN.Slt	Pidana Narkotika	Putusan
		IV		✓	Pendampingan Hukum	Pidana Narkotika	Lengkap
		IV		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkotika	Lengkap

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
		IV		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Narkotika	Lengkap
8	Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah.	I	✓		104/Pdt.G/2024/PA.Kra	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		313/Pdt.G/2024/PA.Kra	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		362/Pdt.G/2024/PA.Kra	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Penyuluhan Hukum	Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Lengkap
		III	✓		36//Pid.Sus/2024/PN.Kra	Pidana Narkotika	Putusan
		III		✓	Penyuluhan Hukum	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan oleh ASH Shohwan Joyotakan	Lengkap
		III		✓	Penyuluhan Hukum	Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan oleh Salimah PC Serengan	Lengkap
		IV	✓		20//Pid.Sus/2024/PN.Krg	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		1//Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kra	Pidana Pengkeroyokan	Putusan
9	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.	II		✓	Pemberdayaan Masyarakat	Sertifikat halal bagi produk UMKM dampingan LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah	Lengkap
		II	✓		156/Pdt.G/2024/PA.Sr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		0069/Pdt.G/2024/PA.Sr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		0362/Pdt.G/2024/PA.Kln	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		492/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		491/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
10	Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil	II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Penyidikan)	Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan	Lengkap
		II	✓		134/Pid.B/2024/PN.Smg	Pidana Senjata Tajam	Putusan
		III	✓		203/PID.SUS/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		134/Pid.B/2024/PN.Smg	Pidana Pencurian	Putusan
		III	✓		10/Pid.Sus-Anak /2024/PN.Smg	Pidana Senjata Tajam	Putusan
		III		✓	Pendampingan Hukum	Pengaduan kepolisian terkait perampasan	Lengkap
		III		✓	Pendampingan Hukum	penyidikan penggelapan	Lengkap
		II	✓		144/Pid.B/2024/PN.Smg	Pidana Senjata Tajam	Putusan
		IV	✓		421/Pid.B/2024/PN.Smg	Pidana Pencurian dengan kekerasan	Putusan
		IV	✓		469/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		363/Pid.B/2024/PN.Smg	Pidana Pencurian dengan kekerasan	Putusan
		IV	✓		317/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Bahan Peledak	Putusan
11	Lembaga Bantuan Hukum Kamilia.	I	✓		230/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		667/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		794/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		678/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1467/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1468/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1494/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		1671/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
12	Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma.	I	✓		326/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		I	✓		161/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		339/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		56/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		336/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1004/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1281/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1324/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
13	Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara (LPP Sekar Jepara).	III	✓		1187/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		1669/Pdt.G/2024/PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		I		✓	Penyaluhan Hukum	Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Anak dengan Memahami Undang-Undang Perkawinan	Lengkap
		II		✓	Penyaluhan Hukum	Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Anak dengan Memahami Undang-Undang Perkawinan	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Negosiasi)	Negoasiasi akses jalan	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Mediasi di Luar Pengadilan)	Mediasi perselisihan keluarga	Lengkap
		II		✓	Konsultasi Hukum	Konsultasi terkait KDRT yang dialami	Lengkap
		II		✓	Pemberdayaan Masyarakat	Memahami Pembuatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri (PN)	Lengkap
		III		✓	Pendampingan Hukum	Negosiasi utang piutang	Lengkap
		III		✓	Pendampingan Hukum	Negosiasi utang piutang	Lengkap
		III	✓		581/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		IV		✓	Penyaluhan Hukum	Memahami Perbuatan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	Lengkap
		IV		✓	Pendampingan Hukum	Mediasi batas tanah	Lengkap
14	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners.	I	✓		51/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		I	✓		54/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		45/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		0270/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		135/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		767/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		747/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
15	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus.	III	✓		742/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		I	✓		53/Pdt.G/2024/PA.Kds	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Konsultasi Hukum	Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 379 huruf (a) Jo. Pasal 372 KUHP	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum (Perubahan Tahun Kelahiran)	Perubahan tahun kelahiran dengan Penetapan Pengadilan	Lengkap
		II		✓	Pendampingan Hukum	Permasalahan utang piutang	Lengkap
		III		✓	Penyaluhan Hukum	Pendampingan hukum secara gratis menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011	Lengkap
		III	✓		67/Pid.Sus/2024/PN.Kds	Pidana Judi	Putusan
16	Lembaga Bantuan Hukum Kudus.	III	✓		68/Pid.Sus/2024/PN.Kds	Pidana Judi	Putusan
		I	✓		39/Pdt.G/2024/PA.Kds	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Pendampingan Hukum	Penggantian nama anak di Pengadilan	Lengkap
		II	✓		8/Pid.Sus/2024/PN.Kds	Pidana Pencabulan	Putusan
		II	✓		2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds	Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan	Putusan
		III	✓		7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds	Pidana Pencurian	Putusan
		III	✓		7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds	Pidana Pencurian	Putusan
17		III	✓		8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds	Pidana Bahan Peledak	Putusan
		I	✓		130 /Pdt.G / 2024 / PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu.	I		✓	Penyaluran Hukum	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Lengkap
		II	✓		662 /Pdt.G /2024 /PA.Smg	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		460 /Pdt.G /2024 /PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		469 /Pdt.G /2024 /PA.Dmk	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Penyaluran Hukum	Narkoba Dan Penanggulannya Di Kabupaten Grobogan	Lengkap
		III	✓		1682 /Pdt.G /2024 /PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		697 /Pdt.G /2024 /PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		1588 /Pdt.G /2024 /PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		934/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		2179/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
18	Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia.	I	✓		115/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		236/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		339/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		435/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		237/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		348/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		437/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		IV	✓		580/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
19	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng.	IV	✓		1013/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		218/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		344/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		II		✓	Pendampingan Hukum	Kekerasan dalam rumah tangga	Lengkap
		III	✓		505/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		655/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		III		✓	Pendampingan Hukum	Kekerasan dalam rumah tangga	Lengkap
		IV	✓		2021/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
20	Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sakti Purworejo.	IV	✓		2640/Pdt.G/2024/PA.Pwd	Perdata Perceraian	Putusan
		I	✓		114/Pdt.G/2024/PA.Pwr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		18/Pid.Sus/2024/PN Pwr	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		15/Pid.B/2024/PN Pwr	Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan	Putusan
		II	✓		24/Pid.Sus/2024/PN Pwr	Pidana Persetubuhan	Putusan
		III	✓		161/Pdt.G/2024/PA.Pwr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		658/Pdt.G/2024/PA.Pwr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		707/Pdt.G/2024/PA.Pwr	Perdata Perceraian	Putusan
21	Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara	IV	✓		58/Pid.B/2024/PA.Pwr	Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan	Putusan
		IV	✓		75/Pid.Sus/2024/PA.Pwr	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		82/Pid.Sus/2024/PA.Pwr	Pidana Narkotika	Putusan
		I	✓		21/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		99/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		367/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		571/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		757/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
22	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal	III	✓		446/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		817/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		III	✓		718/Pdt.G/2024/PA.Jepr	Perdata Perceraian	Putusan
		IV		✓	Pendampingan Hukum	Perdata Perceraian	Lengkap
		IV		✓	Pendampingan Hukum	Perdata Perceraian	Lengkap
		I	✓		4/Pid.Sus/2024/PN Btg	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		21/Pdt.G/2024/PN.Kdl	Perdata Perceraian	Putusan
		II	✓		10/Pid.Sus/2024/PN.Kdl	Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi	Putusan
		II	✓		13/Pid.Sus/2024/PN.Kdl	Pidana Persetubuhan	Putusan
		III	✓		32/Pid.B/2024/PN.Kdl	Pidana Pembunuhan	Putusan
		III	✓		34/Pid.Sus/2024/PN.Btg	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		86/Pid.Sus/2024/PN.Btg	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		111/Pid.SUS/2024/PN.Kdl	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓		99/Pid.SUS/2024/PN.Kdl	Pidana Narkotika	Putusan
		IV	✓				

No	Nama OBH	Triwulan	Jenis Pemberian Bantuan Hukum		Nomor Perkara>Nama Kegiatan	Resume	Keterangan
			Litigasi	Non-Litigasi			
23	Perkumpulan Law And Justice Semarang	II	✓		711/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		271/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		16/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		11/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		II	✓		51/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		208/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg	Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi	Putusan
		III	✓		102/Pid.Sus/2024/PN.Smg	Pidana Narkotika	Putusan
		III	✓		8/Pid.Sus-Anak /2024/PN.Smg	Pidana Senjata Tajam	Putusan
	TOTAL	200	153	47			

Selain Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum juga sebagai penunjang indikator kinerja program Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan melalui dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM. Pada tahun 2024 Biro Hukum telah melakukan fasilitasi penanganan sengketa aset sejumlah 11 sengketa aset, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14.
Rekapitulasi Fasilitasi Permasalahan Sengketa Aset
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	OPD Pemprov Jateng	Bulan	Permasalahan	Tempat	Keterangan
1	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Januari	Pemanfaatan Aset dan Penentuan Tarif Perpanjangan Sewa Aset	Kabupaten Batang	Telah Difasilitasi
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Februari	Dugaan Adanya Tumpang Tindih Tanah	Kota Tegal	Telah Difasilitasi
3	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Maret	Sengketa Kepemilikan	Kota Magelang	Telah Difasilitasi
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	April	Tumpang Tindih Sertifikat	Kabupaten Pemalang	Telah Difasilitasi
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Mei	Pembuatan Pagar Keliling diatas tanah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah namun terdapat penolakan dari warga sekitar karena eksisting tanah tersebut saat ini dimanfaatkan sebagai jalan menuju areal pertanian	Kabupaten Banjarnegara	Telah Difasilitasi

No	OPD Pemprov Jateng	Bulan	Permasalahan	Tempat	Keterangan
6	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Mei	Permasalahan perubahan data (balik nama, jenis penggunaan tanah dan luasan) sertifikat HP 14 Tahun 1984	Kota Semarang	Telah Difasilitasi
7	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Juli	Permasalahan Penyerahan P3D belum diserahkan sertifikatnya	Kabupaten Batang	Telah Difasilitasi
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Agustus	Mitigasi permasalahan hukum terkait dengan kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan dan TPST di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Telah Difasilitasi
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	September	PERMOHONAN HAK -HAK PT IPU	Kota Semarang	Telah Difasilitasi
10	Balai SELUNA PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Oktober	Pemanfaatan Aset di Balai Seluna Kab Pati	Kabupaten Pati	Telah Difasilitasi
11	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi PUBMCK Provinsi Jawa Tengah	November	Pemanfaatan Aset PUBMCK Provinsi Jateng	Kabupaten Blora	Telah Difasilitasi

Selain itu juga telah memberikan fasilitasi penanganan aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang hukum dan HAM sejumlah 23 aduan, seperti tabel berikut :

Tabel 3.16.
Fasilitasi Aduan Masyarakat Terkait HAM Tahun 2024

No	Pengadu	Bulan	Permasalahan	Keterangan
1	Defender of Justice	Januari	Terkait Permasalahan Tol-Sayung Demak	Telah difasilitasi
2	Hermayanti	Januari	Ketidakpuasan terhadap hasil penanganan Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2)	Telah difasilitasi
3	Muzayin	Januari	Permasalahan Pertanahan dengan alas hak C Desa Kutukan Nomor 3285 atas nama Suradi	Telah difasilitasi
4	Marwaji	Januari	Permohonan Pembayaran Kompensasi SUTET/SUTT	Telah difasilitasi

No	Pengadu	Bulan	Permasalahan	Keterangan
5	LBH Yusuf	Januari	Dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah terhadap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kepada Kepala Desa agar memilih Pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024	Telah difasilitasi
6	Novianto	Februari	Permohonan proses pengajuan Hak Milik atas Rumah Negara Gol. III yang terletak di Kelurahan Sine Kabupaten Sragen	Telah difasilitasi
7	Adhie Lukito	Februari	Permasalahan Pelayanan Yang ada di RS. Moewardi	Telah difasilitasi
8	Anisitus Amanat Gaham	Februari	Konsultasi mengenai investasi di Kawasan PRPP	Telah difasilitasi
9	Roni Rinto Nugroho	Februari	Pelayanan Administrasi Pertanahan di Desa Watuagung (Kec. Tuntang Kabupaten Semarang)	Telah difasilitasi
10	Slamet	Maret	Mohon Pengembalian Berkas Aduan Masyarakat	Telah difasilitasi
11	Aduan LSM Alaska	April	Permohonan pelepasan tanah kepada Gubernur Jawa Tengah dan PTPN IX Klaten	Telah difasilitasi
12	Safaatun	April	Aduan mengenai PAW DPRD Kabupaten Jepara	Telah difasilitasi
13	Meilani Sabtuti	Juni	Permasalahan tanah di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 5 Ungaran	Telah difasilitasi
14	Adam Jetis	Juni	Permasalahan Perbuatan Tidak Menyenangkan karena menyebarkan data pribadi	Telah difasilitasi
15	Pak Misbah	September	Permasalahan Jual Beli Tanah di Desa Sruwen Kabupaten Semarang	Telah difasilitasi
16	Masyarakat Desa Sendangharjo	September	Kepala Desa Sendangharjo yang telah diberhentikan saat ini masih menjalankan tupuksinya, masyarakat mengawal upaya banding administratif Kepala Desa	Telah difasilitasi
17	Disperindag Provinsi Jawa Tengah	September	Permasalahan HaHak Konsumen	Telah difasilitasi
18	Kantor Hukum "M H K"	September	Permasalahan Perjajian pemanfaatan lahan antara Yayasan Nasima dan Yayasan Diponegoro	Telah difasilitasi
19	Tokoh Masyarakat Pati	Oktober	Pelayanan Pajak di SAMSAT Kabupaten Pati	Telah difasilitasi
20	Kajati Jawa Tengah	Oktober	Himbauan Penggunaan Nama Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Telah difasilitasi

No	Pengadu	Bulan	Permasalahan	Keterangan
21	Nanang Taroko	Desember	Permohonan Pemenuhan Dokumen Persyaratan PPPK	Telah difasilitasi
22	Warga Desa Kembangarum	Desember	Mohon Dukungan Tertulis Peralihan HGB dan HP Aset BUMN menjadi HM warga	Telah difasilitasi
23	Aksanu	Desember	Permohonan Hapus BDO di Bank BRI	Telah difasilitasi

Selain itu Biro Hukum juga telah melakukan penilaian terkait Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP-HAM) kepada 35 kabupaten/kota se- Jawa Tengah.

- c. Selanjutnya Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum yang merupakan indikator penunjang indikator kinerja program utama yang ada di Biro Hukum, didukung oleh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang pelaksanaannya didukung oleh Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatannya terfokus pada sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, diantaranya adalah :
- Sosialisasi pemberantasan cukai ilegal melalui pembuatan dan pemasangan iklan videotron, penyebaran iklan banner, spanduk, leaflet yang bertema "GEMPUR CUKAI ILEGAL".
 - Sosialisasi Pemberantasan Cukai Ilegal kepada masyarakat bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan KKN Tematik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang berlokasi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Brebes.
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui talkshow di radio.

Sedangkan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD merupakan kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum berupa kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan umum, kegiatan survey peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Biro Hukum dengan nilai capaian IKM sebesar 86, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada awal Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.821.837.000,- yang kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp.3.648.837.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.602.928.240,- (98,74%). Rincian penggunaan anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.772.628.000	2.751.443.490	99,24
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1.672.552.000	1.665.561.955	99,58
	b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.100.076.000	1.085.881.535	98,71
2	Program Administrasi Umum	876.209.000	851.484.750	97,18
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.000	679.595.200	97,09
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.209.000	171.889.550	97,55

3.3 INOVASI

Biro Hukum pada tahun 2024 dalam upaya penyebaran / penyuluhan informasi hukum kepada aparatur pemerintah dan masyarakat secara interaktif dengan membangun ruang sarana melalui Podcast JDI Hukum Biro Hukum.

3.4 PENGHARGAAN

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Urusan-Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 telah memperoleh beberapa penghargaan, antara lain :

a. **Penghargaan Terbaik ke-3 Pengelola JDIH Terbaik kategori Pemerintah Provinsi.**

Pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2024 dengan tema "JDIHN berkualitas, meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum" yang bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pembinaan kepada seluruh Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota JDIHN yang terdiri dari unsur Kementerian, Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, diselenggarakan pemberian Penghargaan JDIHN Award Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan JDIH oleh Pusat JDIHN kepada Anggota JDIH se Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Prof. Dr. Widodo Eka Cahyana, SH, MHum) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah (Iwanuddin Inskandar, SH, MHum) berupa **Penghargaan Terbaik ke-3 Pengelola JDIH Terbaik kategori Pemerintah Provinsi** dengan nilai 97 (Kategori Eka Acalapati (Nilai 76 s.d 100)). Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan Terbaik Ke-2 Pengelola JDIH Terbaik kategori DPRD Provinsi dengan nilai 92 (Kategori Eka Acalapati (Nilai 76 s.d 100)).

Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan Pengelolaan JDIH Terbaik Kategori Kabupaten yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya untuk Anggota JDIH Kategori DPRD terdapat 3 (tiga) Sekretariat DPRD yang mendapatkan penghargaan JDIH Terbaik Kategori DPRD yaitu DPRD Kabupaten Batang, DPRD Kota Surakarta dan DPRD Kota Semarang. Selanjutnya Untuk Kategori JDIH Perguruan Tinggi Terbaik, Universitas Tidar berhasil mendapatkan penghargaan Terbaik ke 2 Pengelola JDIH Kategori Perguruan Tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Tengah juga berhasil mengintegrasikan 2 (dua) Perguruan Tinggi di Jawa Tengah menjadi anggota JDIHN yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), sehingga kedua Universitas dimaksud mendapatkan penghargaan Anggota JDIHN Yang Terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID tahun 2024. Selain itu Sekeratriat DPRD Kota Salatiga juga mendapatkan penghargaan kategori khusus peningkatan kinerja pengelolaan JDIH terbaik pada Zona Wilayah Barat Tingkat DPRD Kota.

Penghargaan Pengelolaan JDIH Terbaik banyak diraih oleh Anggota JDIHN yang berada di wilayah Jawa Tengah sebagai hasil pembinaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam membina Anggota JDIH

yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memajukan pengelolaan JDIH dalam memberikan layanan literasi hukum untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Terbaik III JDIH Awards Tahun 2024



b. Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang telah berhasil membina Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli HAM karena telah berhasil mendorong 34 Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pada tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 76 yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia. Peringatan Hari HAM ke 76 mengusung tema Harmoni Dalam Keberagaman, Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung tema tersebut, Kementerian HAM RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah dan melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hak Asasi Manusia (Natalius Pigai), serta para Duta Besar dari berbagai negara.

Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Dra. Emma Rachmawati, MHum) didampingi Kepala Biro Hukum Jawa Tengah (Iwanuddin Iskandar, SH. MHum).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri HAM RI dan diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah (Emma Rachmawati).

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 20 Provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun sebagian besar Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui Indikator Kabupaten/kota Peduli HAM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Aspek Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ditekankan pada Hak Sipil dan Politik Masyarakat dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Gambar 3.2.
Penerimaan Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang telah berhasil membina Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli HAM karena telah berhasil mendorong 34 Kabupaten/Kota Peduli HAM





Gambar 3.3.
**Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi yang telah berhasil
membina Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023**



**c. Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024.**

Biro Hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Administrasi Barang/Jasa

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan memperoleh Penghargaan sebagai Terbaik III dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tingkat Biro.

Gambar 3.4.
Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024



Gambar 3.4.
Piagam Penghargaan Dan Piala Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2024 telah terlaksana sesuai target yaitu capaian sebesar 100% dengan kategori "**Baik**".

Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp. 2.772.628.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.751.443.490,- (99,24 %). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% sesuai target; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 104% melebihi dari target 96%. Sedangkan **Program Administrasi Umum** sebagai program pendukung dengan alokasi anggaran Rp.876.209.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.851.484.750,- (97,18%).

Pencapaian sesuai target yang diharapkan karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Selain itu keberadaan aplikasi layanan yang dimiliki Biro Hukum seperti E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa

Tengah, Aplikasi Waskito Jateng, Aplikasi Rencana Aksi HAM (RANHAM), Aplikasi Layanan Bantuan Hukum (Bantuan Hukum Online) serta Pelita Jateng mempermudah pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien, serta layanan bantuan hukum dan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Disamping itu adanya beberapa keberhasilan dalam mendapatkan prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya :

1. Mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024.
2. Memperoleh penghargaan Terbaik ke-3 Pengelola JDIH Terbaik kategori Pemerintah Provinsi.
3. Memperoleh Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik III Tingkat Biro Tahun 2024.

4.2. REKOMENDASI

1. Perlu untuk mengikutisertakan 11 orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan pengembangan karier disamping sebagai upaya untuk mendukung kinerja, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dengan disertai penambahan alokasi anggaran yang memadai.
2. Perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum terkait perolehan kuota peserta diklat perancang peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada kelompok rentan di Jawa Tengah yang sedang menghadapi permasalahan hukum belum sepenuhnya terakomodir.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM.
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 29 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96%
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	96%
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.772.628.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 876.209.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	96% ✓
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	96% ✓
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum dan sengketa hukum.	Persentase bantuan hukum dan penegakan hukum yang tertangani.	96% ✓
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas kabupaten/kota peduli HAM.	Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96% ✓
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100% ✓

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.438.990.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 526.209.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

jdih.jatengprov.go.id
birohukumjateng@gmail.com
024-8311282